



Rencana Kenaikan BBM Bulan April 2012

Venti Eka Satya^{*)}

Abstrak

Kenaikan harga BBM di dalam negeri sudah tidak dapat dihindari lagi. Hal ini merupakan dampak dari lonjakan harga minyak dunia. Subsidi BBM ini cukup membebani anggaran Pemerintah Pusat, sehingga secara bertahap pemerintah harus mengurangi jumlah subsidi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena kenaikannya pasti diiringi oleh kenaikan harga barang yang selanjutnya akan berdampak juga pada tingkat inflasi. Dampak positifnya, pemerintah dapat menghemat anggaran dan menyalurkannya pada proyek-proyek atau program-program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan utama pemberian subsidi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu tingkat konsumsi BBM yang berbiaya tinggi juga akan dapat ditekan.

Pendahuluan

Banyak pakar yang menyatakan bahwa harga BBM memang sudah seharusnya dinaikkan, bahkan DPR sudah memberikan ruang pada pemerintah untuk menaikkan harga minyak bersubsidi ini sejak dua tahun yang lalu. Pemerintah dinilai lambat dalam merumuskan kebijakan bahan bakar. Untuk mengurangi subsidi, pemerintah mencanangkan pembatasan konsumsi bahan bakar, akan tetapi hal ini tidak pernah dijalankan. Menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Aziz, budaya subsidi harus dihilangkan dalam manajemen bahan bakar minyak.

Presiden Susilo Bambang Yudiyono memastikan bahwa harga BBM bersubsidi

akan dinaikkan. Hal ini dilakukan agar Indonesia mampu bertahan dari dampak krisis. Harga minyak mentah dunia yang terus meningkat semakin membebani APBN dengan bertambahnya beban subsidi. Beban anggaran untuk subsidi BBM tahun 2011 sudah mencapai angka 165,2 triliun rupiah. Meskipun anggaran subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) tahun ini sudah jauh berkurang yaitu sebesar 123,6 triliun, angka tersebut tetap saja besar dan membebani anggaran negara. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa kenaikan harga minyak akan direalisasikan pada bulan April tahun 2012. Diharapkan dengan kenaikan harga ini pemerintah bisa menghemat anggaran dan menekan konsumsi BBM.

^{*)} Calon Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: ventieka@y7mail.com

Kebijakan Subsidi dan Produksi BBM Indonesia

Saat ini terdapat tiga jenis BBM yang disubsidi pemerintah yaitu: Solar Premium dan Minyak tanah. Semakin besar jumlah konsumsi BBM, maka semakin besar subsidi yang harus dikeluarkan, artinya semakin besar pula anggaran subsidi dalam APBN.

Harga BBM di Indonesia adalah harga yang diaturoleh pemerintah dan berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM setelah memperhatikan biaya-biaya pokok penyediaan BBM yang diberikan PERTAMINA serta tingkat kemampuan (*willingness to pay*) masyarakat.

Kebijakan subsidi BBM sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Pemerintah menengahinya dengan mengurangi jumlah subsidi tanpa menghapuskan sama sekali. Hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang miskin tidak mampu membeli BBM bila harganya diserahkan pada mekanisme pasar. Selain itu, bila harga diserahkan pada mekanisme pasar, maka harga BBM jenis yang sama akan berbeda-beda di setiap daerah dan daerah yang paling dirugikan adalah yang berada paling jauh dari pusat distribusi BBM. Hal ini tentunya akan menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dan perlu diingat bahwa BBM merupakan sumber energi vital dan strategis menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu negara harus tetap memegang kendali atas kebijakan harga jualnya.

Persentase subsidi BBM terbilang besar dalam APBN Indonesia. Dan jumlahnya fluktuatif sesuai dengan kenaikan harga minyak dunia dan jumlah produksi minyak dalam negeri. Dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat, peningkatannya mencapai 50 triliun rupiah hingga 70 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan jumlah anggaran pos-pos yang lain pada APBN, subsidi BBM memiliki porsi yang cukup besar. Pihak yang kontra dengan subsidi beranggapan seharusnya anggaran subsidi bisa dialokasikan untuk kegiatan lain.

Meskipun kenaikan harga minyak dipasar spot memberikan keuntungan pada Indonesia, akan tetapi tingginya konsumsi BBM dalam negeri membuat keuntungan dari penjualan tersebut tidak memadai karena Indonesia menjual lebih sedikit dan membeli lebih banyak. Kontribusi produksi minyak Indonesian terus mengalami penurunan. Kontribusi tertinggi minyak Indonesia adalah pada tahun 1984, mencapai 8% dari total produksi minyak OPEC. Setelah itu rekor tersebut tidak pernah tercapai lagi.

Untuk menghasilkan BBM, kilang-kilang minyak di Indonesia menggunakan *input*: (i) minyak mentah yang diimpor dari luar negeri, dan (ii) minyak mentah produksi dalam negeri. Elemen biaya penyediaan BBM di dalam negeri, dengan memperhatikan mekanisme penyediaan tersebut, meliputi: (i) biaya impor minyak mentah (*crude oil*); (ii) biaya pembelian minyak mentah produksi dalam negeri; (iii) biaya impor BBM; (iv) biaya pengilangan (*refining*); (v) biaya distribusi; (vi) biaya tak langsung.

Sejak tahun 2000, Indonesia telah menjadi *net imported*, menjual minyak mentah sekaligus mengimpor BBM. Kenaikan harga minyak yang dulunya dianggap *windfall profit* sekarang menjadi tambahan biaya, karena pemerintah harus menaikkan jumlah subsidi BBM.

Padabulan april mendatang pemerintah merencana untuk mengurangi subsidi BBM bersubsidi yang berakibat pada

Tabel 1. Porsi Subsidi BBM

Tahun	Subsidi BBM (triliun rupiah)	Belanja Pusat (triliun rupiah)	Rasio
2005	95,6	361,15	26,47
2006	64,2	440,03	14,59
2007	83,8	504,6	16,6
2008	139,1	693,3	20,06
2009	45,04	628,8	7,16
2010	88,89	697,4	12,75
2011	165,2	908,2	18,1
2012	123,6	954,1	12,95

Sumber: Koran Tempo

kenaikan harga BBM bersubsidi. Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo menyatakan, dalam menentukan besarnya angka kenaikan BBM, pemerintah menyediakan empat opsi. Keempat opsi tersebut telah diajukan kepada Komisi VII DPR pada tanggal 28 Februari 2012. Selain menyampaikan keempat opsi tersebut, pemerintah juga menjelaskan dampak dari tiap-tiap opsi kenaikan harga.

Selain untuk penghematan anggaran, dengan naiknya harga, konsumsi BBM juga dapat ditekan. Dan diharapkan masyarakat akan meningkatkan upaya untuk mencari dan menggunakan sumber energi alternatif yang lebih murah. Pemerintah telah merencanakan pengalokasian penghematan BBM tersebut pada beberapa program seperti membangun infrastruktur bahan bakar gas (BBG), memberi subsidi kepada angkutan umum untuk konversi BBM ke BBG, serta memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Sebenarnya pemerintah sudah lama mendorong penggunaan Gas dan batu bara sebagai sumber energi alternatif, akan tetapi hal ini tidak terlalu mendapat sambutan karena BBM yang penggunaannya lebih mudah dapat diperoleh dengan harga murah karena subsidi.

Selain itu, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran di kementerian/lembaga. Dengan mendorong belanja pemerintah maka dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya daya beli masyarakat dapat dikurangi.

Dampak Kenaikan Harga BBM

Untuk Indonesia, kenaikan harga minyak dunia secara makro akan berdampak pada jumlah penerimaan negara, peningkatan subsidi BBM dan peningkatan Tarif Dasar Listrik serta tingkat inflasi. Yang paling utama apakah pemerintah akan turut menyesuaikan harga minyak/BBM di dalam negeri atau tidak.

Bila BBM tidak dinaikkan, maka subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin meningkat. Hal ini akan mengurangi porsi anggaran untuk pos-pos anggaran lain seperti infrastruktur, kesehatan

Tabel 2.
Empat Opsi Kenaikan Harga dan Dampaknya

Kenaikan harga	Penghematan	Dampak inflasi
Rp 500	Rp 19,15 triliun	0,5%
Rp1.000	Rp38,3 triliun	1,0%
Rp1.500	Rp57 triliun	1,6%
Rp2.000	Rp76,6 triliun	2,8%

Sumber: Media Indonesia

masyarakat dan lain-lainnya. Dengan tidak adanya kenaikan BBM, subsidi yang harus disediakan pemerintah juga semakin besar.

Saat ini kenaikan harga BBM dalam negeri tidak dapat lagi dihindari. Kenaikan harga minyak dunia saat ini sudah mencapai US\$115 per barel, bahkan beberapa analis mengatakan tahun ini angkanya bisa mencapai US\$130 per barel. Pemenuhan kebutuhan BBM secara nasional yang terus meningkat sulit mengandalkan kilang-kilang Pertamina yang rata-rata dibangun sejak tahun 1970-1980. Dengan tingkat efisiensi rendah dan kapasitas terbatas, perseroan itu hingga kini masih mengimpor BBM untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak.

Ahli ekonomi dari Universitas Andalas, Prof Dr Elfindri, mengisyaratkan, pemerintah harus berani menerapkan kebijakan pembatasan subsidi dengan cara bertahap. Misalnya, menaikkan dulu sebesar Rp1.000,00 pada 2012, kemudian tahun depan naikkan lagi Rp1.000,00 per liter, dan seterusnya. Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengusulkan kenaikan harga yang paling moderat Rp1.000. Dengan kenaikan sebesar itu dampaknya terhadap inflasi relatif kecil. Jika pemerintah masih bertahan dengan kebijakan memberikan subsidi, infrastruktur di Tanah Air pasti tidak akan terbiayai. Selain itu yang akan lebih banyak menikmati subsidi ini adalah masyarakat menengah ke atas, dan bukan masyarakat miskin, berarti subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran. Hanya 15 persen subsidi BBM yang sampai ke rakyat yang berhak, dimana 77 persennya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

Biasanya kenaikan BBM, akan mengakibatkan naiknya biaya produksi

dan biaya distribusi yang akan berdampak pada kenaikan harga barang, dan otomatis angka inflasi juga akan meningkat. Dengan begitu daya beli masyarakat akan merosot, karena penghasilan tetap. Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu. Di sisi lain, kredit macet semakin meningkat, yang paling parah adalah semakin sempitnya lapangan kerja karena dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan harga serta penurunan permintaan barang.

Pemerintah harus melakukan langkah-langkah bijak untuk menghindari terjadinya gejolak harga dan dampaknya pada peningkatan angka kemiskinan. Karena yang paling menderita akibat kenaikan harga ini adalah masyarakat kecil yang berpenghasilan tetap dan pas-pasan. Pemerintah harus mengalokasikan penghematan anggaran hasil dari pengurangan subsidi kepada program-program atau proyek-proyek yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghematan biaya subsidi dapat dialihkan pada perbaikan infrastruktur, maka jalur distribusi akan lebih lancar dan murah, sehingga kenaikan harga bisa ditekan. Peningkatan daya beli masyarakat bisa ditingkatkan dengan memberi bantuan langsung atau membangun proyek-proyek padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Penutup

Kebijakan subsidi BBM sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Pemerintah menengahinya dengan mengurangi jumlah subsidi tanpa menghapuskan sama sekali. Hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang miskin tidak mampu membeli BBM bila harganya diserahkan pada mekanisme pasar. Selain itu, bila harga diserahkan pada mekanisme pasar, maka harga BBM jenis yang sama akan berbeda-beda di setiap daerah dan daerah yang paling dirugikan adalah yang berada paling jauh dari pusat distribusi BBM.

Akan tetapi, subsidi BBM yang diberikan saat ini sudah sangat membebani

APBN karena lonjakan harga minyak dunia dan jumlah konsumsi dalam negeri yang terus meningkat. Untuk itu pemerintah harus melakukan pengurangan subsidi secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial di masyarakat.

Pengurangan subsidi tentunya akan menaikkan harga BBM dan berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan lainnya. Hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat, mengganggu tingkat produksi dan meningkatkan inflasi. Sehingga pemerintah perlu memikirkan pengalokasian penghematan anggaran akibat pengurangan subsidi tersebut pada program-program atau proyek-proyek yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penekanan biaya-biaya atau faktor-faktor produksi lain. Selain itu kenaikan harga BBM dapat menekan konsumsi BBM dan meningkatkan daya saing sumber energi lain seperti gas bumi dan batu bara.

Rujukan:

1. "Pemerintah harus berani batasi subsidi BBM," <http://www.antaraneews.com> diakses tanggal 24 Februari 2012.
2. Brahmantio Isdijoso. "Studi Dampak Penghapusan Subsidi Bbm Terhadap Perekonomian, Efisiensi Dan Peluang Usaha Bagi Pertamina", Makalah, 2000.
3. Kuncoro, Mudrajad. 2009, "Ekonomika Indonesia-Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global", UPP STM IK YKPN, Yogyakarta.
4. Juli Panglima Saragih (2010) Sejarah Perminyakan di Indonesia. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.
5. "Penaikan Harga BBM Disarankan Rp1.000." *Media Indonesia*, 24 Februari 2012.
6. "Presiden Telat Naikkan Harga BBM," *Koran Tempo*, 24 Februari 2012.
7. "Harga Minyak Bersubsidi Diperkirakan Naik Per 1 April," *Koran Tempo*, 24 Februari 2012.
8. "Ada Empat Opsi Usulan Harga BBM," *Media Indonesia*, 28 Februari 2012.